



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

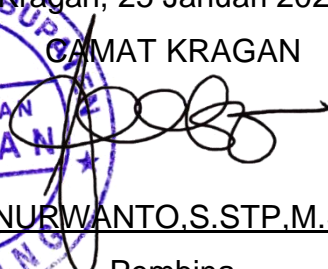
**KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kragan Tahun 2023, merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kecamatan Kragan dalam mengimplementasikan e- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggung Jawaban Pejabat Publik kepada Masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu Tahun Anggaran Tahun 2023. Proses kinerja Kantor Kecamatan Kragan telah diukur, di evaluasi, di analisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dimasing-masing Perangkat Daerah,serta keberhasilan, capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagaimana bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang.

Kragan, 25 Januari 2024
CAMAT KRAGAN

NURWANTO,S.STP,M.Si
Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.3 Isu – isu Strategis dan Permasalahan Utama	9
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Perencanaan Kinerja	15
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	23
3.2 Analisis Capaian Kinerja	24
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	48
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	51
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kragan	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kragan Tahun 2021- 2026	14
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2023	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Tahun 2021 - 2026	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2023	16
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahunan (Rkt) Tahun 2023 Kecamatan Kragan	18
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Tahun 2023	21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2023	23
Tabel 3.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan didalam rencana strategis organisasi dan merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2023, diharapkan :

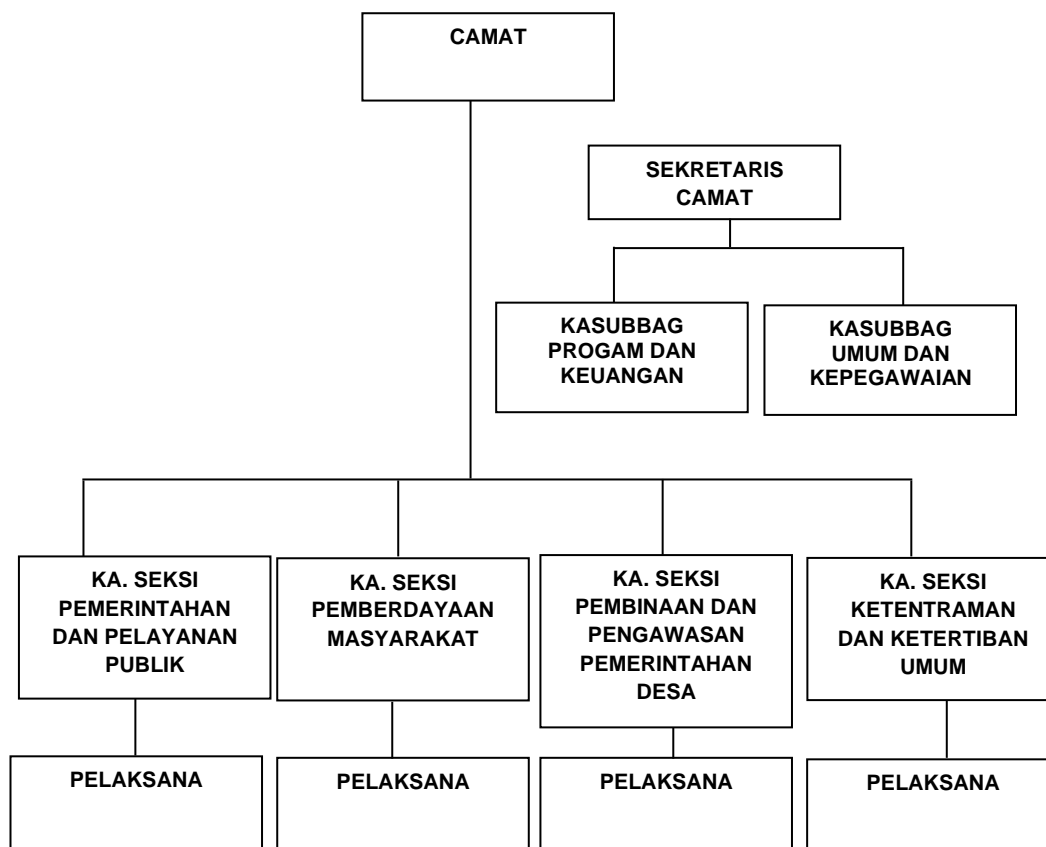
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ;
2. Mendorong Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerjanya ;
4. Memberikan kepercayaan kepada ASN di Lingkungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TABEL 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kragan
 Perbup Rembang Nomor 79 Tahun 2021



Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari Peraturan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan,

- barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 ISU – ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Yang menjadi isu strategis Kecamatan Kragan adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Publik;
2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Beberapa kendala/masalah yang dihadapi Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan;
3. Rendahnya kinerja Pemerintah Desa;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
5. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat;
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Terdapat akar permasalahan yang harus mendapatkan penanganan, antara lain :

1. Belum optimalnya pengawasan melekat;

2. Belum dilaksanakan review SOP Pelayanan;
3. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN;
4. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan ASN dan kinerja ASN;
5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan;
6. Minimnya Aparatur yang menguasai IT;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi;
8. Belum optimalnya kemampuan lembaga pemerintahan desa;
9. Masih banyaknya perangkat desa yang kurang kompeten;
10. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
11. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 12 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang selama tahun 2023 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3 Isu – isu Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perencanaan Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Rekomendasi
- Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategi Kecamatan Kragan tahun 2021-2026, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Rembang, yaitu :

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“ Rembang Gemilang 2026 ”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsipgampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

C. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ”

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kragan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Kragan yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

2. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kragan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Kragan selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut :

“ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2021 -2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kragan
Tahun 2021- 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja						
				Kondisi Awal		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	Na	Na	82	83	84	85	86

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Kragan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Kragan dalam tahun 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	3,2
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Angka	83

2.3 PERJANJIAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan yang telah ditetapkan tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KRAGAN
TAHUN 2021 - 2026**

Misi I : "Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi"

Tujuan : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN/ ANGKA	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Olahan Data OPD

B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi / misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kecamatan Kragan untuk mencapainya dalam Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan		
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.2
2.	Sasaran		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	83

No	Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja	Target	Pengampu
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD		60-70	Sekcam
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kasubag ProgKeu
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	Kasubag ProgKeu
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Kasubag Umpeg

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	Kasubag Umpeg
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	Kasubag Umpeg
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Kasubag Umpeg
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100%	Kasubag Umpeg
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		100%	Kasi P3
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Kasi P3
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Pemerintah Desa yang Lunas Bayar PBB	100%	Kasi P3
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat		100%	Kasi PM
		Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat \geq Rp 20.000.000,-		27	Kasi PM
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	Kasi PM
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	Kasi Trantibum
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Kasi Trantibum
V.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	Kasi Trantibum
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Kasi Trantibum

VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik		100%	Kasi Binwas
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Rata - rata IKM Desa	70	Kasi Binwas

2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

A. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
KECAMATAN KRAGAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	60 - 70
			Persentase yang disampaikan ke Publik	95%
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	95%
			Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun	3 Dokumen
			Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik	2 Informasi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Kualitas Baik	3 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja dengan kualitas baik	3 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	3 Dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terlayani Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan Keuangan yang dikelola dengan baik	12 Bulan
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Rekomendasi hasil Reviu LKPD oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	3 Dokumen

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	4 Dokumen
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Seragam ASN	1 Paket
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN sesuai Tugas dan Fungsi	1 Paket
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Material	Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12 Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	2 Dokumen
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas dengan kondisi baik	12 Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin lainnya dengan kondisi baik	12 Bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Kondisi Baik	1 Paket
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	100%

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen / Pelaporan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikelola dengan baik	100%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Urusan Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan yang diakomodir	1 Kegiatan
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDes oleh APIP yang ditindaklanjuti	12 Bulan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%
		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	27 Desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	12 Bulan
			Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100%
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten	27 Desa
		Fasiltasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Pemenuhan Jabatan Perangkat Desa	27 Desa
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Mempertahankan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Berwawasan Kebangsaan	27 Desa

B. Pagu Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kragan pada tahun 2023, berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 besaran pagu APBD Induk Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah **Rp 2.532.121.700,-** (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Pada Perubahan APBD Tahun 2023 berkurang menjadi **Rp 2.175.388.709,-** (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Sebagaimana terlihat dari tabel 2.6 berikut ini :

TABEL 2.6
PAGU ANGGARAN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	KECAMATAN	2.532.121.700	2.175.389.709	356.731.991
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.280.374.000	2.100.519.709	179.854.291
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	0	10.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.867.547.800	1.811.530.119	56.017.681
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.900.000	0	10.900.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.452.300	39.859.530	64.592.770
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	22.000.000	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.351.900	198.975.000	19.376.900
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.122.000	28.155.060	18.966.940
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.075.000	600.000	25.475.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.800.000	600.000	10.200.000
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.275.000	0	15.275.000
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.851.700	32.770.000	48.081.700
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	24.270.000	10.730.000

2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.851.700	8.500.000	37.351.700
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.000.000	25.200.000	18.800.000
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.000.000	25.200.000	18.800.000
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.000.000	0	30.000.000
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000	0	30.000.000
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.821.000	16.300.000	54.521.000
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	4.000.000	6.000.000
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.421.000	0	28.421.000
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	12.300.000	7.700.000
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.400.000	0	12.400.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun setiap tahunnya. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Kragan tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2023.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50%

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Tujuan						
.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,2	3,34	104,38
Sasaran						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	83,58	100,70

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor

Kecamatan Kragan mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik. Untuk mempertahankan capaian Sasaran kinerja Kantor Kecamatan Kragan kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kragan 2021 - 2026 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2023. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Kragan pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,2	3,34	104,38	Baik	Kec. Kragan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83,58	100,70	Baik	
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70	66,21	94,59	Baik	
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95	95	100	Baik	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	3	100	Baik	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3	100	Baik	
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	Baik	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100	Baik	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	100	Baik	
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	100	Baik	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	Baik	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	Baik	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	0	1	100	Baik	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	Baik	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	Baik	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	Baik	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	Baik	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	Baik	
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	Baik	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100	Baik	
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	100	Baik	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	12	12	100	Baik	
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	Baik	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	2	100	Baik	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	Baik	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Baik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	Baik	
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	90	90	100	Baik	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	20	20	100	Baik	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	27	100	Baik	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100	Baik	
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Baik	
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Baik	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100%	91,17	91,17	Baik	
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Baik	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	Baik	
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat \geq Rp 20.000.000,-	20	27	135	Baik	
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	20	27	135	Baik	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	100	Baik	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Baik	
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Baik	

4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Baik	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Baik	
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100	Baik	
5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	70	100	Baik	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	27	100	Baik	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27	27	100	Baik	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	27	27	100	Baik	

2. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Na	3,18	100	3,1	3,28	105,81	3,2	3,34	104,38
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Na	79,54	100	82	82,05	100,06	83	83,58	100,70
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70	63	90,00	60-70	65	92,86	60-70	66,21	94,59
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100	100	90	90	100	95	95	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	100	3	3	100	0	3	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	100	3	3	100	0	3	100
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19	100	19	19	100	19	19	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	100	12	12	100	6	6	100
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	100	1	1	100	0	1	100

1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik		100	100	100	100	100	100	100	100
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100	100	100	100	100	100	100	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik		0	100	100	0	100	0	1	100
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti		12	100	12	12	100	12	12	100

1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	0	0	0	0	2	2	100
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	100	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	100	1	1	100	1	1	100
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik		90	100	90	90	100	90	90	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny		20	100	20	20	100	20	20	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27	100	27	27	100	27	27	100
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3	100	3	3	100	1	1	100
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	100	100	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB		89,65	89,65	100%	76,95	76,95	100%	91,17	91,17

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	100	12	12	100	12	12	100
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-		10	100	15	15	100	20	27	135
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola		10	100	15	15	100	20	27	135
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		7	100	7	7	100	7	7	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	100	12	12	100	12	12	100
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	100	12	12	100	12	12	100
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola		100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa			100				100	70	70	100
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		27	100	27	27		100	27	27	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		27	100	27	27		100	27	27	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		27	100	27	27		100	27	27	100

3. Perbandingan capaian realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
Tujuan												
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	Na	3,18	100	3,1	3,28	105,81	3,2	3,34	104,38
Sasaran												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Na	79,54	100	82	82,05	100,06	83	83,58	100,70

4. Perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja								
				Target			Realisasi			Target		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	Na	3,1	3,2	3,18	3,28	3,34	3,3	3,4	3,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Na	82	83	79,54	82,05	83,58	84	85	86

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,2	3,34	104,38	Dibutuhkan Peningkatan Kompetensi ASN	Evaluasi Ulang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83,58	100,70	Dibutuhkan Peningkatan Kompetensi ASN	Evaluasi Ulang

1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70	66,21	94,59	Dibutuhkan Peningkatan Kompetensi ASN	Evaluasi Ulang
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95	95	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	3	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	100	Tidak dianggarkan	Evaluasi Ulang
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	0	100	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	Tidak Dianggarkan	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100	Tidak Dianggarkan	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	100	Tidak Dianggarkan	Evaluasi Ulang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	12	12	100	Tidak Dianggarkan	Evaluasi Ulang
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	0	Tidak Dianggarkan	Evaluasi Ulang

1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	90	90	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	20	20	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	27	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100%	91,17	91,17	Tidak dianggarkan	Evaluasi Ulang

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	20	27	135	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	20	27	135	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang

5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa			100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi Ulang
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	27	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27	27	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	27	27	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi Ulang

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	Capaian 2022	Target Kinerja 2023	Capaian 2023	Menunjang / Tidak Menunjang	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	19	21	22
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik					Nilai Indeks Pelayanan Publik / IPP	angka	3,28	3,2	3,34		Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	angka	82,05	83	83,58		$\left\{ \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \times \text{Nilai Dasar (25)} \right\}$

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Nilai Sakip OPD	angka	65	60-70	66,21	M	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan $\frac{\text{Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD}} \times 100$
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	3	M	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	3	3	3	M	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	3	3	3	M	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi $\frac{\text{Keuangan OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan Admonistrasi Keuangan OPD}} \times 100$
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	19	19	M	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	12	M	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	3	3	3	M	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi $\frac{\text{Kepegawaian OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan Admonistrasi Kepegawaian OPD}} \times 100$

					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	3	4	4		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah X 100 Jumlah seluruh urusan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	M	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	12	M	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	M	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
						Persentase pemenuhan pelayanan umum	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah X 100 Jumlah seluruh urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	bulan	12	12	12	M	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	12	12	12	M	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	12	M	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	12	M	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	12	12	12	M	

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	12	M	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	12	M	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Jumlah pelaksanaan urusan Pengadaan <u>Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
					Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	TM	
					Pengadaan Mebelair	Jumlah Unit Mebelair yang Disediakan	Unit	2	0	0	TM	
					Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Pkt	1	1	1	M	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Jumlah pelaksanaan urusan Pemeliharaan <u>Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	20	M	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	27	27		
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	5	5	M	

					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah sarana / prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	1	M	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik _____ X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg tdk dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	6	6	6	M	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	%	79,95	80	91,17	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	%	1	1	1	M	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa _____ X 100 Jumlah seluruh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	15	24	27	M	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa

					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	angka	7	7	7	M	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	desa	27	27	27	M	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Koordinasi <u>Ketentraman dan Ketertiban Umum</u> X 100 Jumlah seluruh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi <u>Upaya Penyelenggaraan Trantib</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	desa	27	27	27	M	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan <u>Urusan Pemerintahan Umum</u> X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	%	0	0	0	TM	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi <u>Penerapan Penyelenggaraan Trantib</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib

					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka	0	1	0	TM	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	100	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Pembinaan <u>Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</u> X 100 Jumlah seluruh Program Pembinaan
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	angka	70	70	70	M	Jumlah pelaksanaan urusan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan <u>dan Pengawasan Pemerintahan Desa</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Fasilitasi
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dok	27	27	27	M	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dok	27	27	27	M	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dok	27	27	27	M	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dok	0	0	0	TM	
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dok	7	0	0	TM	

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		3,2	3,34	104,38	2.175.389.709	2.108.430.548	96,92	3,08
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		83	83,58	100,70	2.175.389.709	2.108.430.548	96,92	3,08
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	60-70	66,21	94,59	2.100.519.709	2.043.650.548	97,29	2,71
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	95	100	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	3	100	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3	100	-	-	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	1.811.530.119	1.760.691.088	97,19	2,81
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100	1.786.410.119	1.735.571.088	97,15	2,85
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	100	25.120.000	25.120.000	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	100	-	-	-	-
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	-	-	-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	-	-	-	-
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	100	100	-	-	-	-
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	39.859.530	39.782.100	99,81	0,19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	60.000	60.000	100,00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	869.500	849.500	97,70	2,30
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	8.965.000	8.965.000	100,00	-
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	3.130.600	3.130.600	100,00	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Material	12	12	100	9.784.430	9.727.000	99,41	0,59

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	17.050.000	17.050.000	100,00	-
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	22.000.000	22.000.000	100,00	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	100	22.000.000	22.000.000	100,00	-
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	198.975.000	193.784.360	97,39	2,61
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	12.000.000	11.748.735	97,91	2,09
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100	186.975.000	182.035.625	97,36	2,64
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	90	100	28.155.060	27.393.000	97,29	2,71
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	20	100	22.624.900	22.404.000	99,02	0,98
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	27	27	100	1.340.000	800.000	59,70	40,30
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1	1	100	4.190.160	4.189.000	99,97	0,03
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	600.000	600.000	100,00	-
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100	600.000	600.000	100,00	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	91,17	91,17	-	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	600.000	600.000	100,00	-
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	32.770.000	31.680.000	96,67	3,33
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20	27	135	32.770.000	31.680.000	96,67	3,33
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	100	24.270.000	24.180.000	99,63	0,37
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	8.500.000	7.500.000	88,24	11,76

4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100	25.200.000	16.200.000	64,29	35,71
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	25.200.000	16.200.000	64,29	35,71
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	25.200.000	16.200.000	64,29	35,71
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	16.300.000	16.300.000	100,00	-
5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70	70	100	16.300.000	16.300.000	100,00	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	27	100	4.000.000	4.000.000	100,00	-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27	27	100	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	27	27	100	12.300.000	12.300.000	100,00	-

Dalam uraian tabel diatas dana yang dialokasikan untuk Kecamatan Kragan setelah perubahan Rp 2.175.389.709,- dengan realisasi Rp 2.108.430.548,- maka bisa diambil kesimpulan terdapat efisiensi sebesar 3,08%.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

A. Laporan Realisasi Anggaran

Besaran pagu APBD Induk Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah **Rp 2.532.121.700,-** (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Pada Perubahan APBD Tahun 2023 berkurang menjadi **Rp 2.175.388.709,-** (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp 2.108.430.548,-** (dua miliar seratus delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan serapan sebesar **96,92 %**.

TABEL 3.5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase (%)
	KECAMATAN	2.175.389.709	2.108.430.548	66.959.161	96,92
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.100.519.709	2.043.650.548	56.869.161	97,29
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.811.530.119	1.760.691.088	50.839.031	97,19
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.859.530	39.782.100	77.430	99,81
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	22.000.000	-	100,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.975.000	193.784.360	5.190.640	97,39
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.155.060	27.393.000	762.060	97,29
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	600.000	600.000	-	100,00
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	600.000	-	100,00
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.770.000	31.680.000	1.090.000	96,67
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.270.000	24.180.000	90.000	99,63
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.500.000	7.500.000	1.000.000	88,24
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.200.000	16.200.000	9.000.000	64,29

1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.200.000	16.200.000	9.000.000	64,29
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.300.000	16.300.000	-	100,00
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000	4.000.000	-	100,00
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.300.000	12.300.000	-	100,00
	Jumlah	2.175.389.709	2.108.430.548	66.959.161	96,92

B. Inovasi Kecamatan Kragan

Inovasi yang dilakukan kecamatan Kragan diantaranya :

1. Mengadakan Rakor Kades bersama Forkopimcam dan OPD di Kecamatan Kragan. Rakor Kades dilaksanakan secara rutin, bertempat di Balai Desa dan dilaksanakan bergiliran setiap bulan. Rakor Kades berguna untuk mengevaluasi Administrasi Desa, Kedisiplinan Perangkat Desa dan Intensifikasi PBB.
2. Upacara Bersama Pemerintah Desa dengan FORKOPIPCAM dan ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Kragan setiap tanggal 17.

C. Kegagalan Yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mengatasi kendala dari isu strategis masih ada Kegagalan dalam pencapaian kinerja kantor Kecamatan Kragan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
2. Masih banyaknya angka pengangguran di Kecamatan Kragan.
3. Rendahnya minat Generasi muda dalam berwirausaha.
4. Masih rendahnya tingkat Pendidikan di Masyarakat.
5. Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk membayar PBB.

D. Keberhasilan Yang Telah Dicapai

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan terbentuknya BUMDesa.
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa.
4. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel.
5. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Kragan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan Umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Kragan melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (~~Amat Baik / Baik / Cukup baik / kurang~~) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Besaran pagu APBD Induk Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah Rp 2.532.121.700,- . Pada Perubahan APBD Tahun 2023 berkurang menjadi Rp 2.175.388.709,- dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.108.430.548,- dengan serapan sebesar 96,92 % dan sisa anggaran sebesar Rp 66.959.161,- atau 3,08%.
2. Permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2023 antara lain:
 - a. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran.
 - b. Belum adanya koordinasi secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
 - c. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
 - d. Belum optimalnya koordinasi intern OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengevaluasi Perencanaan
2. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
3. Mensosialisasikan visi dan misi daerah dan OPD
4. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
5. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Kragan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kragan, 25 Januari 2024



KRAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19671212 198806 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl.Raya Kragan Km.02 Kragan,Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURWANTO,S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Kragan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan , 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,

NURWANTO,S.STP,M.Si
Pembina
NIP.19851015 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan :		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
2	Sasaran :		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
3	Direktif Pimpinan :		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP KECAMATAN	66,21

No.	Pogram	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.519.709	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat	32.770.000	APBD
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.300.000	APBD
4.	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	600.000	APBD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.200.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	APBD
Jumlah		2.175.388.709	

Kragan, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,
CAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KECAMATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Riyanta, S.Pi
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : Nurwanto, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

Kragan, November 2023

Pihak Pertama



AGUS RIYANTA, S.Pi

Penata Tingkat I

NIP. 19700523 200501 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Unit Kerja : Kecamatan Kragan
Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Program :			
1	Meningkatnya Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	60 - 70
Sasaran Kegiatan :			
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%
3	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%
4	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%
5	Meningkatnya Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%
6	Terpeliharanya BMD Dengan Kondisi Baik	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100%
7	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	2.100.519.709	APBD


CAMAT KRAGAN
NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 198510152004121001

Kragan, November 2023
SEKRETARIS KECAMATAN


AGUS RIYANTA, S.Pi
 Pembina
 NIP. 197005232005011009



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heny Setyo Bekti, SE.MM
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurwanto, S.STP,M.Si
Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
NURWANTO, S, STP, M. Si
Perbina
NIP. 19851015 200412 1 001

Kragan, November 2023
Pihak Pertama

HENY SETYO BEKTI, SE.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760304 201001 2 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Unit Kerja : Kecamatan Kragan
Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
1	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%
2	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%
3	Meningkatnya Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%
4	Terpeliharanya BMD Dengan Kondisi Baik	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100%
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
Sasaran Sub Kegiatan :			
1	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok
2	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dok
3	Tercukupinya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
4	Tercukupinya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
5	Tercukupinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
6	Tercukupinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
7	Tercukupinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
8	Tercukupinya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket
9	Tercukupinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket

10	Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
11	Terepenuhinya Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Paket
12	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit
13	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit
14	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
15	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
16	Tercukupinya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
17	Terepenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
18	Tercukupinya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan



Kragan, November 2023
Kasubag Umum dan Kepegawaian


Heny Setyo Bakti, SE.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760304 201001 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraning Khombarwati
Jabatan : Kasubag Prgram dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurwanto, S.STP,M.Si
Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NURWANTO, S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001


NURANING KHOMBARWATI
Penata

NIP. 19660220 199403 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kragan
Kasubag Program dan Keuangan

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%
Sasaran Sub Kegiatan :			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	2 Dok.
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
3	Tercukupinya Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang
4	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok.
5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.811.530.119	APBD
Jumlah		1.811.530.119	

No.	Sub. Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.786.410.119	APBD

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.120.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	APBD

Jumlah **1.811.530.119**



Kragan, November 2023
Kasubag Program dan Keuangan

(Handwritten Signature)
Muraming Khombarwati
Penata

NIP. 19660220 199403 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita Juli Astuti, SE.MM

Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurwanto,S.STP,M.Si

Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan , November 2023


Pihak Pertama

NITA JULI ASTUTI, S.Pd.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830430 201001 2 030

Pihak Kedua



NURWANTO,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kragan
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
1	Meningkatnya Rata-rata IKM Desa	Rata-rata IKM Desa	72
Sasaran Sub Kegiatan :			
1	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27 Dok.
2	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dok.
3	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	27 Dok.
4	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok.

Kragan, November 2023

CAMAT KRAGAN



Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

[Handwritten Signature]

NITA JULI ASTUTI, SE.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19830430 201001 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naniek Lestari,S.Si
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurwanto,S.STP,M.Si
Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
KRAGAN
NURWANTO, S. STP, M. Si
Pembina
NIP. 19851015 2004 12 1 001

Pihak Pertama

NANIEK LESTARI, S. Si

Penata Tingkat I

NIP. 19760401 200701 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kragan
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%
Sasaran Sub Kegiatan :			
1	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga
2	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan



Kragan, November 2023
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

(Signature)
NANIEK LESTARI, S. Si
Penata Tingkat I
NIP. 197604012007012010





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Masduki Chumaidi,SE

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurwanto,S.STP,M.Si

Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Pertama

ALI MASDUKI CHUMAI,SE

Penata

NIP.19750815 199903 1 005

Pihak Kedua

NURWANTO,S.STP,M.Si

Pembina

NIP.19830115 200412 1 001

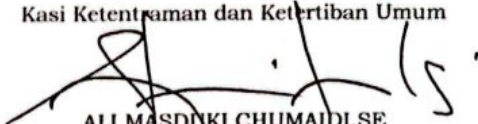
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kragan
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
1	Meningkatnya Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%
2	Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3 Kegiatan
Sasaran Sub Kegiatan :			
1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27 Laporan
2	Meningkatnya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang



Kragan, November 2023
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


ALI MASDUKI CHUMAIDI, SE
Penata
NIP. 19750815 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri Hidayat Purwanto,SE

Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurwanto,S.STP,M.Si

Jabatan : Camat Kragan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Pertama

HERI HIDAYAT PURWANTO,SE

Penata Tingkat I

NIP. 19791003 201001 1 020



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kragan

Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
2	Meningkatnya Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	95%
Sasaran Sub Kegiatan :			
1	Terlaksananya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan
2	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	27 Laporan

Kragan, November 2023
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan PublikHeri Hidayat Purwanto, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19791003 201001 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Subag Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwik Alfiah
Jabatan : Pengelola Kepegawaian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heny Setyo Bkti,SE.MM
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Heny Setyo Bkti,SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19760304 201001 2 015

Pihak Pertama

Wiwik Alfiah

Pengatur Tingkat I

NIP. 19690502 200906 2 001

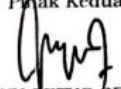
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2		3	4
1	Terlaksananya pendataan, pengusulan Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Diklat serta sanksi kepegawaian dan administrasi kepegawaian lainnya	1	Terkumpulnya data kepegawaian	19 orang
		2	Tersusunya informasi kepegawaian meliputi biodata, riwayat hidup, riwayat pekerjaan, status, kedudukan, dan data lainnya	19 orang
		3	Tersusunya data kepegawaian pada buku jaga atau dalam bentuk file (soft copy maupun cetak)	19 orang
		4	Terkelolanya bahan kepegawaian dan memroses pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen, BPJS, Cuti, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, impasing, mutasi, usulan Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberian Tanda Penghargaan, Sumpah/Janji, sanksi kepegawaian serta administrasi kepegawaian lainnya	19 orang
		5	Merekapitulasi dan mengolah daftar hadir untuk penghitungan tunjangan kinerja	19 orang
		6	Merekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai	19 orang
		7	Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat berdasarkan usulan	19 orang
		8	Menyiapkan bahan petikan surat keputusan kenaikan pangkat	19 orang
		9	Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai BUP berdasarkan usulan	19 orang
		10	Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai karena uzur	19 orang
		11	Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai meninggal dunia, tewas atau hilang berdasarkan usulan	19 orang

		12	Menyiapkan bahan usulan jaminan kecelakaan dan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua	19 orang
		13	Menyiapkan bahan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai	19 orang
		14	Menyiapkan bahan pengangkatan CPNS menjadi PNS	19 orang
		15	Menyiapkan bahan pengambilan sumpah janji	19 orang
		16	Menyiapkan bahan mutasi pegawai satu instansi daerah	19 orang
		17	Menyiapkan bahan mutasi pegawai antar instansi daerah	19 orang
		18	Menyiapkan bahan mutasi pegawai antar instansi pusat dan instansi daerah	19 orang
		19	Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan usulan	19 orang
		20	Menyiapkan bahan penyiapan pengangkatan dan impasing jabatan fungsional berdasarkan usulan	19 orang

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

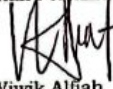


HENY SETYO, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19760304 201001 2 015

Pihak Pertama



Wiwik Alifah

Pengatur Tingkat I

NIP. 19690502 200906 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukono

Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heny Setyo Bkti,SE.MM

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Heny Setyo Bkti, SE.MM

Penata Tingkat I
NIP. 19760304 201001 2 015

Pihak Pertama

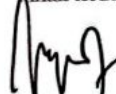
Sukono

Pengatur Tingkat I
NIP. 19700221 200906 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan Pendokumentasian Bahan dan Dokumen Umum	1	Tersedianya bahan pengadministrasi umum di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan untuk diolah menjadi dokumen	12 bulan
		2	Terlaksananya pengumpulan data kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk diolah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan	12 bulan
		3	Penerimaan dan penyortiran dokumen surat kedinasan lainnya untuk diproses sesuai petunjuk pimpinan	12 bulan
		4	Membaca dokumen surat sebelum disediakan kepada pimpinan	12 bulan
		5	Pemberian lembar disposisi pada surat agar memudahkan pengendalian	12 bulan
		6	Pencatatan dokumen surat kedinasan dengan seksama sehingga difahami maksud dan tujuan	12 bulan
		7	Tersedianya dokumen pada pimpinan untuk di proses lebih lanjut	12 bulan
		8	Pendistribusian dan melacak surat sesuai dengan disposisi pimpinan untuk diproses lebih lanjut	12 bulan
		9	Pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya	12 bulan

Pihak Kedua



Heny Setyo Bekti, SE.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760304 201001 2 015

Kragan, November 2023

Pihak Pertama



Sukoro
Pengatur Tingkat I
NIP. 19700221 200906 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Subag Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudlofar

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heny Setyo Bekti, SE.MM

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Heny Setyo Bekti, SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19760304 201001 2 015

Pihak Pertama

Mudlofar

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19680125 199103 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA KEPEGAWAIAN


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2		3	4
	Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan Pendokumentasian Bahan dan Dokumen Umum	1	Tersedianya bahan pengadministrasi umum di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan untuk diolah menjadi dokumen	12 Dokumen
		2	Terlaksananya pengumpulan data kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk diolah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan	12 Dokumen
		3	Penerimaan dan penyortiran dokumen surat kedinasan lainnya untuk diproses sesuai petunjuk pimpinan	12 Dokumen
		4	Membaca dokumen surat sebelum disediakan kepada pimpinan	12 Dokumen
		5	Pemberian lembar disposisi pada surat agar memudahkan pengendalian	12 Dokumen
		6	Pencatatan dokumen surat kedinasan dengan seksama sehingga difahami maksud dan tujuan	12 Dokumen
		7	Tersedianya dokumen pada pimpinan untuk di proses lebih lanjut	12 Dokumen
		8	Pendistribusian dan melacak surat sesuai dengan disposisi pimpinan untuk diproses lebih lanjut	12 Dokumen
		9	Pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya	12 Dokumen

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

HENY SETYO, SE.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760304 201001 2 015

Pihak Pertama


M. W. Ilofar
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19680125 199103 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Subag Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idham Kholid

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heny Setyo Bekt,SE.MM

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Heny Setyo Bekt,SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19760304 201001 2 015

Pihak Pertama

Idham Kholid


Pengatur Tingkat I

NIP. 19691207 200801 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan di bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Tersedianya bahan rencana kerja operasional	100%
		2 Terkumpulnya data kegiatan pengelolaan pemanfaatan BMD	100%
		3 Tersedianya dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah berdasarkan usulan	4 Dokumen
		4 Terlaksananya usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang syah	10 usulan
		5 Tercatatnya dan terinventarisasinya barang milik daerah	100%
		6 Pembuatan KIB	100%
		7 Pemasangan KIB	100%
		8 Pemasangan label barang dan menempelkannya	100%
		9 Terperiksanya barang	100%
		10 Terlaksananya rekapitulasi dan mencocokkan jenis dan jumlah barang	12 bulan
		11 Tersedianya dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	4 Dokumen
		12 Terlaksananya pembuatan dokumen pengajuan Surat Permintaan Barang (SPB) dalam rangka penyerahan BMD	2 Dokumen

Pihak Kedua


 Heny Setyo Bekti, SE, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760304 201001 2 015

Kragan, November 2023

Pihak Pertama


 Idham Kholid
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19691207 200801 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,
tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

Nama : Kuku Setyaningsih,ST
Jabatan : Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nita Juli Astuti, SE.MM
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Nita Juli Astuti,SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830430 201001 2 030

Pihak Pertama

Kuku Setyaningsih,ST

Penata Tingkat I

NIP. 19860227 201001 2 025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan	1	Tersusunnya bahan operasional kerja di lingkungan sub bidang / seksi	100%
		2	Terkumpulnya data / bahan kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%
		3	Tersusunnya jadwal dan materi penyuluhan	27 Desa
		4	Terlaksananya pendampingan dan pemberian penyuluhan masyarakat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	27 Desa
		5	Koordinasi dengan instansi terkait maupun pemerintah desa	100%
		6	Terfasilitasinya kaderisasi masyarakat desa / antar desa	27 Desa
		7	Terfasilitasinya musyawarah desa, musrenbang, dan musyawarah antar desa	27 Desa
		8	Terlaksananya pemberian konsultasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum desa (Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa / Surat Keputusan Kepala Desa)	27 Desa
		9	Terselenggaranya pelatihan Tim Penyusunan RPKMDes dan RKPDes	27 Desa
		10	Terlaksananya pemberian penyuluhan dalam pelatihan peningkatan kapasitas kinerja BPD	27 Desa

Pihak Kedua



Nita Juli Astuti, SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830430 201001 2 030

Kragan, November 2023

Pihak Pertama



Kukuh Setyahingsih, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19860227 201001 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,
tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

Nama : Saelan

Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nita Juli Astuti, SE.MM

Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Nita Juli Astuti, SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830430 201001 2 030

Pihak Pertama

Saelan

Pengatur Tingkat I


NIP. 19680616 200701 1 033

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN**

NO	SABARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1 Tersedianya bahan pelaksanaan operasional kerja	100%
		2 Terkumpulnya data kegiatan	100%
		3 Terkumpulnya dan terolahnya bahan fasilitasi kerjasama desa dengan desa lain	27 Desa
		4 Terkelolanya data kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	27 Desa
		5 Terlaksananya rekapitulasi, mengelola dan mengolah data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	100%
		6 Terolahnya dan teranalisisnya data pemberdayaan lembaga usaha ekonomi	100%
		7 Tersedianya bahan monitoring perkembangan BUMDes	100%
		8 Terkelolanya data dan terhimpunnya laporan BUMDes	100%
		9 Tersedianya Saprasi dan administrasi serta mengelola data usulan musrenbangdes dan musrenbangcam	100%
		10 Terkelolanya bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	100%

Pihak Kedua

Nita Juli Astuti, SE.MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19830430 2010 2 030

Kragan, November 2023
 Pihak Pertama

Saclan
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19680616 200701 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Subag Program dan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucihati, SE

Jabatan : Pengelola Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nuraning Khombarwati

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Nuraning Khombarwati

Penata

NIP. 19660220 199403 2 004

Pihak Pertama

Sucihati, SE

Pengatur

NIP. 19821025 201406 2 001

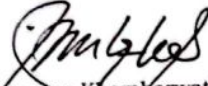
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA KEUANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan laporan di bidang Keuangan	1	Terpelajarinya aturan dan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen penyusunan anggaran	12 bulan
		2	Tersusunnya bahan rencana kerja anggaran per kegiatan bidang	12 bulan
		3	Terlaksananya kegiatan sesuai standarisasi biaya untuk menyusun rencana kerja anggaran	12 bulan
		4	Mencetak dan mengajukan kepada penata keuangan	12 bulan
		5	Terlaksananya pembuatan laporan	1 Dokumen
		6	Tercatatnya bahan permintaan pembayaran	12 bulan
		7	Tersusunnya nota pencairan dana	12 bulan
		8	Tersusunnya RKA -DPA	1 Dokumen
		9	Tercetaknya bahan SPP	12 bulan
		10	Tersedianya laporan	12 bulan
		11	Penerimaan uang dari penata keuangan	12 bulan
		12	Terlaksananya pengecekan jumlah anggaran per rincian obyek kegiatan	12 bulan
		13	Tersedianya kwitansi pembayaran	12 bulan
		14	Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	12 bulan
		15	Pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bukti kas	12 bulan
		16	Terlaksananya pencatatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas	12 bulan
		17	Pengelompokan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kegiatan	12 bulan

		18	Terbayarnya PRD	12 bulan
		19	Penggandaan bukti kwitansi pembayaran	12 bulan
		20	Tersusunya kelengkapan SPJ	12 bulan

Kragan, November 2023
Pihak Pertama

Pihak Kedua


Nurani Khombarwati
Penata

NIP. 19660220 199403 2 004

Sucihati, SE
Pengatur

NIP. 19821025 201406 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Subag Program dan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SH.Yuli Astuti

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nuraning Khombarwati

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Nuraning Khombarwati

SH. Yuli Astuti

Penata

Penata Muda

NIP. 19660220 199403 2 004

NIP. 19790721 200701 2 004

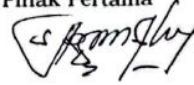
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	1	Tersusunnya bahan rencana strategis tahunan kecamatan	12 bulan
		2	Tersusunnya bahan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan usulan dari bidang / seksi	12 bulan
		3	Tersusunnya bahan Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LPPD	12 bulan
		4	Tersusunnya bahan untuk monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan	12 bulan
		5	Tersusunnya bahan pelaksanaan operasional kerja dilingkungan sub bidang program dan keuangan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan untuk diolah menjadi dokumen rencana operasional kerja	12 bulan
		6	Terkumpulnya Data Kegiatan	12 bulan
		7	Tersusunnya rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten, Renstra SKPD dan usulan kegiatan dari Bidang/seksi dalam rangka musrenbang Kabupaten	12 bulan
		8	Terkelolanya Penyusunan Renja tahunan SKPD	12 bulan
		9	Terbitnya SK Kepala SKPD tentang Penatausahaan Keuangan SKPD	
		10	Tersusunnya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)	
		11	Menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran dan RKAP (Rencana Kerja Perubahan Anggaran)	

		12	Terbitnya SK pelaksanaan kegiatan dipihak ketigakan	
		13	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	

Kragan, November 2023

Pihak Pertama

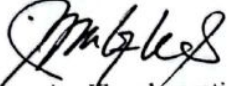


SH. Yuli Astuti, SM

Penata Muda

NIP. 19790721 200701 2 004

Pihak Kedua



Muraning Khombarwati

Penata

NIP. 19660220 199403 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masrukin

Jabatan : Pengadministrasian Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heri Hidayat Puewanto, SE

Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Heri Hidayat Purwanto, SE

Masrukin

Penata Tingkat I

Pengatur Tingkat I

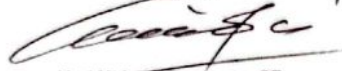
NIP. 19791003 201001 1 020

NIP. 19660609 200701 1 023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASIAN PEMERINTAHAN

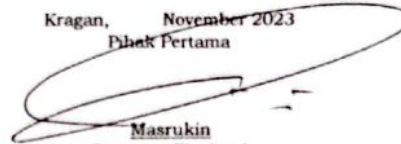
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	1 Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan penyortiran surat masuk dan surat keluar	324 surat
		2 Pemberian lembar pengantar pada surat agar memudahkan dalam pengendalian	324 surat
		3 Terlaksananya pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya guna memudahkan pengendalian	4 Dokumen
		4 Terdokumentasinya surat administrasi kependudukan Desa, Absensi Perangkat Desa/BPD	27 Dokumen
		5 Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas	27 Laporan
		6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	27 kegiatan

Pihak Kedua



Heri Hidayat Purwanto, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19791003 201001 1 020

Kragan, November 2023
 Pihak Pertama



Masrukin
Pengatur Tingkat I
NIP. 19660609 200701 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl. Raya Kragan KM.02 Kragan, Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karyo Praptono
Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heri Hidayat Purwanto, SE
Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Heri Hidayat Purwanto, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19791003 201001 1 020

Kragan, November 2023

Pihak Pertama

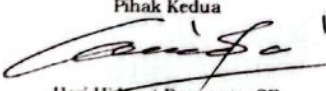
Karyo Praptono

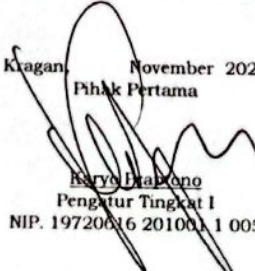
Pengatur Tingkat I

NIP. 19720616 201001 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	2	3	5
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan di bidang Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan	1 Tersedianya bahan rencana operasional kerja di lingkungan seksi pengelolaan aset desa	27 Desa
		2 Terkumpulnya data kegiatan	100%
		3 Tersedianya data/bahan pengelolaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100%
		4 Terkoreksinya data / bahan siskudes, sipades, SID, Podeskel	27 Desa
		5 Terentrynya dan update data/bahan aplikasi pengelolaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa	27 Desa
		6 Terkelolanya data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa	100%
		7 Terkelolanya bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa	100%
		8 Terlaksananya rekapitulasi, mengolah dan memverifikasi data pengelola keuangan dan pendapatan desa	100%
		9 Teridentifikasinya dan termonitoringnya pelaksanaan pemerintahan kepala desa, pengisian perangkat desa dan pembentukan kelembagaan pemerintah desa	27 Desa
		10 Terolahnya data perangkat desa, inventaris sarana dan prasarana pemerintahan desa	100%

Pihak Kedua

Heri Hidayat Purwanto, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19791003 201001 1 020

Klagan, November 2023
 Pihak Pertama

Haryo Dharmaono
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19720616 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl. Raya Km. 02 Kragan Rembang – 59273
Email : kecamatankragan2020@gmail

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 900/18.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Kecamatan Kragan perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 9. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. melakukan konsolidasi dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Kragan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal 2 Januari 2023

CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG,


NUR ROFIK, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19671212 198806 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Kragan
Kabupaten Rembang
Nomor : 900/18.1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Nur Rofik, S.Pd., M.M.	Camat Kragan	Penanggung Jawab
2.	Agus Riyanta, S.Pi.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Nuraning Khombarwati	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
4.	Siti Hajar Yuli Astuti	Pengelola Keuangan	Anggota
5.	Sucihati	Pengelola Gaji	Anggota

CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG,


NUR ROFIK, S.Pd., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19671212 198806 1 002